

KORUPSI DALAM KONSTRUKSI MEDIA: ANALISIS STRUKTUR MIKRO SEMANTIK TEKS BERITA KORUPSI DI TELEVISI

CORRUPTION IN CONSTRUCTION OF MEDIA: SEMANTIC MICROSTRUCTURE ANALYSIS OF CORRUPTION NEWS TEXT

Hari Bakti Mardikantoro, Haryadi

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
haribaktim@mail.unnes.ac.id

(Naskah diterima tanggal 20 Oktober 2018, direvisi terakhir tanggal 2 April 2019, disetujui tanggal 3 April 2019)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan struktur mikro semantik teks berita korupsi di televisi swasta nasional Indonesia. Pengkajian masalah dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan sosiologis empiris dan pendekatan kritis van Dijk. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dengan teknik lanjutan berupa teknik rekam, dan teknik catat. Selain itu, data dijangkar juga dengan metode wawancara dengan pihak redaktur berita di televisi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis wacana kritis van Dijk. Analisis tekstual pada aspek struktur mikro teks berita korupsi di televisi meliputi analisis elemen latar (petunjuk atau keterangan pengaluran yang berhubungan dengan ruang, waktu, dan suasana), elemen detail (menguraikan bagian yang sangat terperinci mengenai suatu peristiwa), elemen maksud (melihat informasi yang menguntungkan bagi penulis atau media dengan menguraikannya secara eksplisit dan jelas), elemen praanggapan (upaya mendukung sebuah pendapat maupun opini dengan cara memberikan premis yang dipercaya kebenarannya, berupa data yang nyata dan konkret), dan elemen nominalisasi (strategi yang sering digunakan untuk menghilangkan kelompok sosial tertentu).

Kata-Kata Kunci: teks berita korupsi, struktur mikro semantik, analisis elemen

Abstract

This study aims to determine the micro semantic structure of corruption news text in national private TV station in Indonesia. This study employed a descriptive qualitative approach through critical discourse analysis by van Dijk. The method of data collection used simak (listening) advanced technique of simak bebas libat cakap, rekam (recording) technique, catat (noting) technique. The research findings show that the textual analysis of microstructure aspect of corruption news text in TV station includes the analysis of background elements (instruction or plotting description related to space, time, and atmosphere), detailed elements (describing very detailed part of a phenomena), purpose elements (looking at information which benefits the writer or media by elaborating the information explicitly and clearly), pre-assumed element (the efforts to support someone's opinion by giving the premise which truth is trusted, in the form of real and concrete data), and nominalization elements (strategy which is commonly used to nominate a certain social group).

Keywords: corruption news text, semantic microstructure, the analysis of elements

1. Pendahuluan

Bahasa hakikatnya bermakna. Hal ini disebabkan oleh lambang bahasa tersebut mengacu

pada suatu konsep, ide, atau pikiran. Konsep, ide atau pikiran itulah yang disampaikan kepada mitra tutur. Dalam konteks ini, bahasa

memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi. Dalam melakukan komunikasi dan interaksi, manusia melakukan transformasi ilmu pengetahuan, budaya hingga perilaku atau cara berkomunikasi.

Komunikasi bisa terjadi secara lisan atau tulis. Salah satu bentuk komunikasi, baik secara lisan maupun tulis ialah komunikasi dalam media massa. Selain media massa, sarana komunikasi juga bisa dilakukan dengan media luar ruang. Media luar ruang adalah sarana komunikasi yang menggunakan alat tertentu yang diletakkan di luar ruang atau di luar gedung (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam Purnami, 2017: 138). Bentuk media luar ruang bermacam-macam, seperti baliho, spanduk, poster, *neon box*, videotron, dan *wall painting*. Dalam konteks media massa, bahasa mengemban fungsi penyampai informasi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Brown dan Yule (1996: 2) serta Leech (1997: 47) yang menyatakan bahwa meskipun bahasa digunakan untuk melaksanakan banyak fungsi komunikasi, fungsi bahasa sebagai penyampai informasi tetap merupakan fungsi yang paling penting.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berita di media massa banyak menarik perhatian masyarakat. Wartawan yang melaporkan suatu berita secara tidak langsung telah memberikan wawasan kepada masyarakat luas, termasuk juga dalam berita mengenai korupsi.

Topik korupsi selalu muncul menjadi *head line* berita, bahkan sering sebagai ulasan utama dalam tajuk (Mardikantoro, 2014: 216). Hal ini dikarenakan korupsi hampir selalu terjadi di Indonesia bahkan sudah membudaya. Korupsi sudah menjadi gaya hidup para pejabat kita. Korupsi merupakan masalah besar yang dihadapi negara-negara dengan perkembangan ekonomi pesat. Itulah salah satu simpulan Transparency International ketika merilis *Corruption Perceptions Index* (CPI). Organisasi anti korupsi ini setiap tahun mengeluarkan laporan korupsi global. Dari 28 negara di kawasan Asia Pasifik, sebagian besar

mendapat peringkat yang buruk. Ada 18 negara yang mendapat skor di bawah 40 dari 100. Angka 0 berarti terkorup dan 100 berarti paling bersih. Indonesia mendapat skor 34, naik dari tahun lalu, 32. Indonesia kini menduduki peringkat 107, bersama-sama dengan Argentina dan Djibouti. Tahun 2014, Indonesia berada pada peringkat 114 dari 174 negara yang diperiksa. Keadaan negara ASEAN lain sebagai berikut: Singapura peringkat 7, Malaysia peringkat 50, Thailand peringkat 85, Filipina peringkat 90, Vietnam peringkat 119, Laos peringkat 145, Kamboja 156, sedangkan Myanmar peringkat 156. Dari data tersebut terlihat bahwa Indonesia merupakan negara terkorup kelima di antara negara-negara ASEAN (Transparency International, 2014)

Keberadaan media massa dijadikan sarana untuk memengaruhi dan mengontrol persepsi masyarakat terhadap wacana yang berkembang di dalam masyarakat. Berita yang ditulis wartawan menjadi tidak seimbang karena ada unsur keberpihakan media massa terhadap suatu kepentingan. Keberpihakan media massa dapat dilihat dari cara wartawan mengkonstruksi wacana berita. Berita yang ditulis wartawan, sebenarnya memiliki maksud tersembunyi yang tidak bisa dilihat melalui teks berita apa adanya. Untuk mengetahui dan memahami maksud atau makna yang tersembunyi di balik teks-teks berita tersebut, perlu dilakukan analisis wacana kritis.

Analisis wacana kritis adalah sebuah upaya atau proses memberi penjelasan sebuah teks (realitas sosial) yang dikaji oleh seseorang dengan untuk memperoleh apa yang diinginkan (Jorgensen dan Phillips, 2007: 97). Artinya dalam sebuah konteks harus disadari akan adanya kepentingan (Darma, 2009: 49). Selain itu, pendekatan kritis menempatkan wacana sebagai *power* (Asher dan Simpson, 1994: 940; Fairclough, 1995: 257; Dijk, 1988b: 178). Renkema (2004: 282) memandang wacana sebagai cerminan dari suatu relasi kekuasaan dalam suatu masyarakat. Pendekatan kritis memahami wacana sebagai suatu bentuk

praktik sosial (Fairclough dan Wodak, 1997: 97).

Dalam praktik sosial, seseorang selalu memiliki tujuan berwacana termasuk tujuan untuk menjalankan kekuasaan. Apabila hal itu terjadi, praktik wacana akan menampilkan efek ideologi, yakni memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidakimbang antara kelas sosial pria dan wanita atau kelompok mayoritas dan minoritas (Subagyo 2010: 177). Dengan demikian, analisis wacana kritis tidak semata-mata mengkaji wacana dari segi internal dan eksternal, tetapi dapat dianggap sebagai 'jendela' untuk melihat motif-motif ideologis dan kepentingan hubungan kekuasaan yang ada dalam masyarakat.

Dari begitu banyak model analisis wacana yang dikembangkan oleh beberapa ahli, model van Dijk menjadi pendekatan yang dirasa paling komprehensif dan sesuai untuk digunakan dalam kajian ini.

Dimensi teks dalam analisis wacana kritis model Dijk dibedakan menjadi tiga struktur yang saling berhubungan. Pertama, struktur makro yang merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. Yang kedua, superstruktur yang merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh. Ketiga, struktur mikro yaitu makna wacana yang dapat diamati melalui bagian kecil dari suatu teks yakni kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar (Eriyanto, 2011: 226, Dijk, 1988a: 17–94). Pada kajian ini hanya dibahas dimensi teks berita korupsi dilihat dari struktur mikro semantik menurut model van Dijk.

2. Metode

Pengkajian masalah dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan sosiologis empiris dan pendekatan kritis. Pendekatan sosiologis empiris untuk me-

mahami wacana sebagai peristiwa tutur yang terikat konteks situasi (Asher dan Simpson 1994: 940). Pendekatan sosiologis empiris untuk mengkaji wacana dari sisi eksternal. Dari sisi eksternal, kajian dapat dikaitkan dengan tiga hal, yaitu pembicara, hal yang dibicarakan, dan mitra wicara atau keterkaitan wacana dengan konteks, yaitu siapa penutur, ditujukan kepada siapa, dituturkan dalam situasi macam apa, dimaksudkan untuk apa, dan seterusnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa apabila dikaitkan dengan konteks berarti kajian berifat pragmatis.

Pendekatan kritis menempatkan wacana sebagai *power* (kekuasaan) (Asher dan Simpson 1994: 940; Fairclough, 1995: 257; Dijk, 1988a: 92) atau memandang wacana sebagai sebuah cerminan dari relasi dalam masyarakat. Pendekatan kritis memahami wacana sebagai bentuk praktik sosial. Dalam praktik sosial, seseorang selalu mempunyai tujuan berwacana, termasuk tujuan untuk menjalankan kekuasaan. Apabila hal ini terjadi, praktik wacana akan menampilkan efek ideologi, yakni produksi dan reproduksi hubungan kekuasaan yang tidakimbang berdasarkan kelas sosial, kelamin (laki-laki dan perempuan), juga kelompok mayoritas dan minoritas.

Data dalam penelitian ini dijangkau dengan menggunakan metode simak (Sudaryanto 2015: 203), yaitu menyimak penggunaan bahasa dalam memproduksi teks berita korupsi di televisi swasta nasional Indonesia. Teknik yang digunakan teknik rekam dan catat. Selain itu, data dijangkau juga dengan metode wawancara. Wawancara dilakukan kepada redaktur berita di televisi. Data penelitian ini berupa penggalan teks berita korupsi di televisi swasta nasional Indonesia. Pengambilan data dilaksanakan selama dua bulan dengan pertimbangan data yang didapatkan sudah cukup dan bervariasi.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis wacana kritis van Dijk (Wodak and Meyer, 2006). Van Dijk membagi analisis wacana menjadi tiga dimensi, yakni

dimensi teks, dimensi kognisi sosial, dan dimensi konteks/praktik sosial (Dijk, 1980: 179; Dijk, 1988a: 93). Dimensi teks berkenaan dengan struktur teks yang terdiri atas kosakata, kalimat, paragraf untuk menjelaskan dan memaknai suatu teks. Suatu teks terdiri atas tiga struktur/tingkatan, yakni struktur makro (makna umum, diamati dengan melihat topik atau tema dalam teks), superstruktur (struktur teks yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh: pendahuluan, isi, penutup), dan struktur mikro (makna teks yang dapat diamati dari bagian kecil suatu teks yakni kata, kalimat, paragraf).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis, wujud dan penggunaan elemen-elemen struktur mikro semantik ke dalam berita korupsi di media televisi dipaparkan sebagai berikut.

3.1.1 Elemem Latar

Latar merupakan seluruh petunjuk atau keterangan pengaluran yang berhubungan dengan ruang, waktu, dan suasana. Latar peristiwa itu dipakai untuk menyediakan dasar hendak ke mana makna teks itu dibawa (Eriyanto, 2011: 235). Elemen latar yang ada di dalam pemberitaan kasus korupsi juga digunakan sebagai latar belakang untuk mendukung dan memperkuat hal yang sudah diberitakan oleh pihak media. Elemen latar yang terdapat di dalam pemberitaan kasus korupsi di media televisi ini secara umum disebabkan oleh meningkatnya kasus korupsi di Indonesia, sehingga merugikan perekonomian negara seperti dipaparkan dari hasil penelitian ICW. Dalam subbab ini akan diuraikan wujud latar pemberitaan secara detail. Metro TV meletakkan latar sebagai *lead* dalam wacana berita korupsi seperti berikut.

- (1) Sembilan kepala sekolah SD dan SM di Bandung Jawa Barat dipecat oleh wali kota Bandung, Ridwan Kamil. Kesembilan kepala sekolah berasal dari SD Negeri Sabang, SD Ne-

geri Banjarsari, SD Negeri Cijagra 1 dan 2, SMP Negeri 2, SMP Negeri 5, SMP Negeri 13, SMP Negeri 6, SMP Negeri 7, dan SMP Negeri 44. Pemecatan dilakukan setelah inspektorat menyelidiki selama 3 bulan dan menemukan praktik pungutan liar serta gratifikasi. (Kepala Sekolah Terlibat Pungli, Metro TV, 22 Oktober 2016)

- (2) Selasa siang berdasarkan laporan dari warga, Satgas gabungan Mabes Polri dan Polda Metro melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan. Empat instansi swasta kedapatan menyuap oknum petugas untuk mempercepat proses pembuatan dokumen lisensi pelaut. Di antaranya PT CIS, SMK Pelayaran Santa Lusiana Jakarta, PT Sumber Bakat Insani, dan PT KSM. (6 Orang Diperiksa Polda Metro Jaya Terkait Pungli, NET, 12 Oktober 2016)
- (3) Di wilayah Bukit Tinggi Sumatra Barat, seorang oknum di kantor samsat diduga melakukan pungli terhadap warga yang akan melakukan cek fisik terhadap kendaraan sebesar 30 ribu rupiah. (Pungli di Samsat Bukit Tinggi Atas Perintah Dirinya, Ini Tanggapan Kanit Regident, Glo-bal TV, 13 Oktober)
- (4) Pada Senin malam Damayanti Wisnu Putranti tersangka kasus suap terkait proyek pekerjaan umum dan perumahan rakyat keluar meninggalkan gedung KPK di Kuningan Jakarta Selatan usai diperiksa selama kurang lebih 12 jam sejak jam 10 pagi. (Perdana, Damayanti Diperiksa KPK, Trans TV, 11 November 2016)
- (5) Pemanggilan mantan anggota DPR tersebut untuk mengonfirmasi adanya aliran dana yang diduga diterima oleh anggota DPR dari proyek e-KTP. Jamal Aziz, Abdul Malik Harmain, Zazuli Zuaeni, dan Mirwan Amir dipanggil oleh penyelidik KPK sebagai saksi dari tersangka Sugiharto. (Dimintai Keterangan untuk Tersangka Sugiharto, TV One, 2 Februari 2017)
- (6) Di ruang sidang Kusuma Atmaja inilah menurut rencana surat dakwaan akan dibacakan atas dua terdakwa Irman dan Sugiharto mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri. Perhatian akan terarah pada isi dakwaan karena pengadilan anti sejumlah nama besar akan terungkap. (Skandal Mega Korupsi Proyek E-KTP, Kompas TV, 7 Maret 2017)

3.1.2 Elemen Detail

Elemen detail pada berita bertujuan untuk menguraikan bagian yang sangat terperinci mengenai suatu peristiwa. Pada kasus korupsi, wacana berita korupsi menunjukkan detail mengenai sejarah, kronologi, dan penelusuran mengenai kasus korupsi yang telah terjadi. Detail di sini menjadi penjelas secara terperinci dan mendalam bahwa stasiun televisi melakukan penelusuran mengenai kasus korupsi di Indonesia, seperti pada penggalan-penggalan berita berikut.

- (7) Ini bukan pertama kalinya Dahlan tersandung kasus hukum. Pada tahun 2013, Dahlan disebut dalam dakwaan tersangka kasus mobil listrik. Namun, pengadilan tindak pidana korupsi menyatakan Dahlan tidak terlibat. Lolos dari kasus mobil listrik, dua tahun kemudian Dahlan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek Pembangunan Gardu Induk PLN oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kasus merugikan negara hingga 1 triliun rupiah. Namun Dahlan memenangkan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan status tersangkanya digugurkan. (Kasus Hukum Dahlan Iskan, Metro TV, 29 Oktober 2016)
- (8) Senin pagi mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan penuh panggilan pemeriksaan Kejaksaan Negeri Jawa Timur. Dahlan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pelepasan 33 aset berupa tanah dan bangunan perusahaan milik BUMD Pemprov Jawa Timur pada periode 2000 hingga 2010 senilai 900 milyar rupiah. (Dahlan Iskan Diperiksa sebagai Saksi, NET, 17 Oktober 2016)
- (9) “Dan saya perlu mengingatkan di seluruh lembaga, di seluruh instansi mulai sekarang ini stop yang namanya pungli, hentikan yang namanya pungli. Terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, pelayanan pada rakyat.” kata Presiden Jokowi (Pungutan Liar di Kemenhub, 6 Orang Diperiksa, Global TV, 11 Oktober 2016)
- (10) Pemeriksaan Dahlan dilanjutkan pada 18, 19, kemudian 24 dan 27 Oktober. Setelah lima kali diperiksa Dahlan pun ditetapkan sebagai tersangka dan menyusul Wisnu di rutan Medaeng. Dahlan diduga mengetahui dan menyetujui pelepasan aset PT PWU di Kediri

dan Tulung Agung ke PT Sempulur Adi Mandiri atau PT SAM. (Perjalanan Kasus Dahlan, Trans TV, 31 Oktober)

- (11) Jamal Aziz, Abdul Malik Harmain, Zazuli Zuaeni, dan Mirwan Amir dipanggil oleh penyelidik KPK sebagai saksi dari tersangka Sugiharto. Jamal membantah dirinya terlibat dan menerima uang panas tersebut dari proyek e-KTP yang diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp 2 triliun. (Korupsi Proyek E-KTP, TV One, 2 Februari 2017)
- (12) Gamawan Fauzi \$4,5 Juta Amerika Serikat atau sekitar Rp60 milyar untuk dolar saat ini, Ade Komarudin \$100.000 Amerika Serikat setara Rp1,3 milyar, terdakwa Irman Rp14 milyar, terdakwa Sugiharto \$3,4 juta atau Rp4,6 milyar, Marzuki Alie Rp20 milyar, Anas Urbaningrum \$5,5 juta Amerika Serikat sekitar Rp73,7 milyar, Muhammad Nazarudin Rp73,7 milyar, Setya Novanto dan Andi Narogong Rp574,2 milyar, Olly Dondokambey Rp16 milyar, Ganjar Pranowo Rp6 milyar, Yasona Laoly Rp1,125 milyar, Niwan Amir Rp16 milyar, Tamsil Linrung \$700.000.000 Amerika Serikat atau lebih dari Rp9 milyar, Melchias Marcus Mekeng \$1,4 Juta Amerika Serikat setara Rp18 milyar dan auditor BPK Wulung Rp80 Juta. (Perjalanan Proyek E-KTP, Kompas TV, 9 Maret 2017)

3.1.3 Elemen Maksud

Maksud adalah makna dari suatu perbuatan, perkataan, dan sebagainya. Hampir sama dengan elemen detail, elemen maksud juga melihat informasi yang menguntungkan bagi penulis atau media dengan menguraikannya secara eksplisit dan jelas. Sebaliknya, informasi yang merugikan akan disamarkan, diuraikan secara implisit, dan tersembunyi. Judul utama dengan maksud yang ingin disampaikan media televisimemiliki berbagai maksud yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan yang menguntungkan media tersebut. Maksud tersebut tertuang pada kata kunci yang sengaja digunakan dalam wacana yang dikonstruksikan para wartawan di masing-masing media televisi, di antaranya dapat dilihat pada penggalan berikut.

- (13) Dan memang keterlibatan dari Dahlan Iskan ini merupakan hal yang tidak aneh karena ia menjabat sebagai direktur utama PT Panca Wira Usaha sejak tahun 2000 hingga 2010. Sementara kasus yang dibahas kali ini ialah kasus terkait 2 aset yang ada di Kediri dan juga Tulungagung yang diperkirakan ini dilakukan ataupun terjadi pada tahun 2003 ketika Dahlan Iskan masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Panca Wira Usaha. (Dahlan Iskan Ditahan, Metro TV, 28 Oktober 2016)
- (14) Selama menjadi Dirut PT PLN, bahkan Dahlan dikenal beberapa kali tidak mengambil gajinya. Begitupun saat ia memimpin perusahaan daerah, Dahlan tidak mengambil gaji dan tidak menggunakan fasilitasnya. Atas prestasinya membenahi kelistrikan Indonesia tahun 2011, Dahlan pernah mendapat penghargaan sebagai *marketer of the year* Indonesia. (Tidak Ada Perlakuan Khusus untuk Dahlan, NET, 28 Oktober 2016)
- (15) "Saya, saya tidak kaget dengan penetapan sebagai tersangka ini dan kemudian juga ditahan karena seperti anda tahu karena saya lagi diincar terus sama yang berkuasa." tutur Dahlan Iskan. (Perjalanan Kasus Dahlan, Trans TV, 31 Oktober 2016)
- (16) Dalam keterangannya kepada wartawan, Dahlan tak mengaku terima suap atau sogokan sama sekali tetapi penahanan itu terkait adanya tanda tangan. (Pelepasan Aset PT PWU, Global TV, 27 Oktober 2016)
- (17) Jamal membantah dirinya terlibat dan menerima uang panas tersebut dari proyek e-KTP yang diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp 2 triliun. (Korupsi Proyek E-KTP, TV One, 2 Februari 2017)
- (18) Beredar dokumen yang memuat nama-nama sejumlah anggota komisi dua DPR, serta politisi yang disebut menerima komisi dari proyek e-KTP. Jumlah uang yang diterima beragam mulai dari \$25.000 Amerika Serikat atau sebesar Rp334.000.000 hingga \$1.400.000 Amerika Serikat atau sebesar Rp18.000.000.000. (Skandal Mega Korupsi Proyek E-KTP, Kompas TV, 7 Maret 2017)
- yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks. Praanggapan adalah upaya mendukung sebuah pendapat maupun opini dengan cara memberikan premis yang dipercaya kebenarannya, berupa data yang nyata dan kongkret. Dengan adanya praanggapan ini, sebuah pendapat tidak perlu dipertanyakan lagi kebenarannya dan untuk menghindari perdebatan.
- (19) Usai konferensi pers tadi, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menyebut bahwa alat terkait dengan alat pendidikan ataupun proyek di pendidikan ini seharusnya tidak menjadi alat korupsi karena menyangkut dengan kehidupan pada masa yang akan datang. (Anggota DPRD & PNS Dispar Kebumen Jadi Tersangka, Metro TV, 16 Oktober 2016)
- (20) Tadi Laode Muhammad Syarif juga mengatakan bahwa kasus suap yang melibatkan atau masuk ke ranah pendidikan ini sangat merugikan masyarakat di kabupaten Kebumen, sehingga tim penyelidik KPK langsung menetapkan atau melakukan operasi tangkap tangan pada hari Sabtu kemarin. (5 Orang Masih Menjalani Pemeriksaan, NET, 16 Oktober 2016)
- (21) "Internal-internal kemendagri sudah 24 lho kami berhentikan, mulai dia memungut pungli, orang yang mau daftar IPDN dia pungli, sampai perizinan ada yang kita pecat, ada yang kita suruh mundur, ada yang dia malu mundur sendiri. Di daerah yang OTT tertangkap tangan yang kasus korupsi juga ada" kata Tjahyo Kumolo Menteri Dalam Negeri. (Pungli Masih Terjadi di Dishub Banten, Trans TV, 16 Oktober 2016)
- (22) "Mereka berpikir kasus ini akan mengenai Pak Ahok, sedangkan Pak Ahok itu adalah orang yang ingin dilindungi", kata pengamat hukum. Sikap Jokowi ini tentunya mengundang tanda tanya. Mengapa terhadap dugaan korupsi ini dinilai puluhan juta rupiah seorang Jokowi mau terjun langsung, namun terhadap dugaan korupsi ratusan miliar, Jokowi justru bungkam. (Pemberantasan Pungli, Global TV, 13 Oktober 2016)
- (23) Andi dikenal sebagai pengusaha yang mengerjakan proyek E-KTP dan bertugas menagwal anggaran di DPR termasuk komitmen

3.1.4 Elemen Praanggapan

Praanggapan merupakan kebalikan maksud dari elemen latar, yaitu sebuah pernyataan

bagi-bagi jatah bagi anggota dewan. (Korupsi E-KTP, TV One, 4 April 2017)

- (24) Andi diduga kuat menjadi salah satu dalang skandal mega korupsi yang menjerat pejabat Kemendagri dan anggota DPR ini. (KPK: Andi Narogong Berperan Aktif di Proyek E-KTP, Kompas TV, 16 Maret 2017)

3.1.5 Elemen Nominalisasi

Elemen nominalisasi berhubungan erat dengan pertanyaan apakah wartawan memandang objek sebagai suatu kelompok. Nominalisasi merupakan strategi yang sering digunakan untuk menghilangkan kelompok sosial tertentu. Strategi ini berhubungan dengan mengubah kata kerja (verba) menjadi kata benda atau nomina (Eriyanto, 2011: 175).

Media Metro TV lebih sering menggunakan bentuk nominalisasi dalam mengonstruksikan judul berita, seperti "Kasus Suap Irman Gusman, Berantas Pungutan Liar, Korupsi Proyek E-KTP, dan Kasus Pemerasan". Senada dengan media Metro TV, wartawan Global TV lebih banyak memanfaatkan bentuk nominalisasi dalam mengonstruksikan judul berita, seperti "Pemberantasan Pungli, Pelepasan Aset PT PWU, Korupsi Proyek Perumahan Rakyat, Korupsi Penyalahgunaan Izin, Skandal Mega Korupsi Proyek E-KTP". Begitu pula dengan pemilihan judul berita pada media TV One yang semuanya menggunakan bentuk nominalisasi. Judul-judul pada media TV One tersebut seperti berikut, "Korupsi Proyek E-KTP, Sidang Korupsi E-KTP, Korupsi E-KTP, dan Korupsi KTP Elektronik". Penggunaan bentuk nominalisasi tersebut ditandai dengan mengubah kata kerja (verba) menjadi kata benda (nomina). Pemilihan bentuk nominalisasi tersebut digunakan untuk menghilangkan kelompok atau actor/pelaku yang bersangkutan dengan suatu kasus korupsi.

Sementara pada media NET, wartawan lebih memilih menggunakan klausa pasif, seperti "Irman Gusman Kembali Diperiksa KPK, 6 Orang Diperiksa Polda Metro Jaya Terkait Pungli, Dahlan Iskan Ditetapkan Sebagai Tersangka" dan juga klausa aktif, seperti

"5 Orang Masih Menjalani Pemeriksaan, Agus Martowardojo Penuhi Panggilan KPK, dan Petugas Lakukan OTT di Koperasi Belawan". Pemilihan tipe judul yang digunakan dalam pemberitaan kasus korupsi di media Trans TV juga memiliki pola yang hampir sama dengan media NET. Wartawan Trans TV juga lebih memilih menggunakan klausa pasif, seperti "Pungli Masih Terjadi di Dishub Banten, Perjalanan Kasus Dahlan, Perdana, Damayanti Diperiksa KPK, Gubernur Sulawesi Tenggara Tersangka Korupsi, dan Ungkap Kawanan di Korupsi KTP Elektronik". Penggunaan klausa aktif dan pasif dalam pemberitaan tersebut menampilkan aktor atau pelaku sebagai subjek atau fokus utama yang diberitakan. Judul yang digunakan oleh wartawan NET dan Trans TV secara implisit menggiring pada pertanyaan siapa yang bertanggung jawab dalam suatu kasus korupsi yang diberitakan.

Berbeda dengan kelima media yang telah dijelaskan, media Kompas TV terlihat lebih variatif dalam memilih judul beritanya. Dapat dilihat adanya bentuk nominalisasi dalam konstruksi judul berita, seperti "Skandal Mega Korupsi Proyek E-KTP, Perjalanan Proyek E-KTP, KTP Elektronik", dan juga "Nyanjian" Nazarudin di Kasus KTP Elektronik. Selain judul-judul tersebut, juga ditemukan judul dalam bentuk interogatif, yaitu "Siapa Dalang di Balik Mega Korupsi Proyek?" juga judul berbentuk klausa aktif, yakni "KPK Tetapkan Miryam Haryani sebagai Tersangka Baru E-KTP". Di samping itu, pihak media Kompas TV juga memanfaatkan tuturan tokoh atau pihak tertentu untuk dijadikan judul, seperti "Jaksa: Setnov Terima Rp574 M dari Proyek E-KTP" dan "KPK: Andi Narogong Berperan Aktif di Proyek E-KTP". Bentuk pengonstruksian seperti itu dimanfaatkan oleh media Kompas untuk meraih kepercayaan dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa media pro terhadap pemerintahan yang gencar memberantas kasus korupsi di Indonesia.

3.2 Pembahasan

Pada pemberitaan mengenai kasus suap di Dinas Pendidikan Kota Bandung pada data (1), wartawan Metro TV menyajikan latar secara detail mengenai pungutan liar oleh kepala sekolah. Latar yang dipilih wartawan dalam mengonstruksikan pemberitaan tersebut ialah sekolah jenjang SD dan SMP. Dari tuturan Ridwan Kamil yang dimuat dalam berita tersebut, terbentuklah suatu wacana yang menginformasikan kasus pungli yang terjadi di Kota Bandung. Konstruksi berita itu menekankan pada isi siapa saja dan di mana tindakan pungli terjadi.

Pada penggalan teks berita (2), wartawan NET memilih latar berita kronologi awal terjadinya operasi tangkap tangan. Latar yang diletakkan pada inti berita tersebut bertujuan untuk menguatkan argumen dan memberikan citra buruk terhadap instansi yang telah melakukan praktik pungutan liar. Oleh karena itu, wartawan menjelaskan secara detail mengenai kapan dan instansi mana saja yang terlibat sehingga masyarakat dapat menilai sendiri instansi-instansi tersebut.

Pada penggalan teks berita (3), wartawan Global TV memilih latar berita yang secara detail, yakni di Kantor Samsat wilayah Bukit Tinggi, Sumatra Barat. Penggalan berita tersebut diawali dengan pemilihan latar Kota Bukit Tinggi. Namun latar tersebut semakin mengerucut dengan menjelaskan dugaan praktik pungli di Kantor Samsat. Hal itu dimanfaatkan wartawan Global TV agar masyarakat Indonesia lebih berhati-hati dalam melakukan cek fisik kendaraan di semua Kantor Samsat.

Latar dari berita berjudul "Perdana, Damayanti Diperiksa KPK" tersebut berawal dari kronologi pemeriksaan Damayanti Wisnu Putranti terkait kasus suap proyek PUPR. Dari latar yang rinci tersebut, wartawan mengonstruksikan berita mengenai jumlah uang suap dan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa wartawan Trans TV sangat antusias menunggu nama-

nama yang akan diumumkan dari pemeriksaan Damayanti.

Latar dari berita berjudul "Dimintai Keterangan untuk Tersangka Sugiharto" tersebut diawali dengan pemanggilan beberapa mantan DPR sebagai saksi dalam penyelidikan KPK. Nama tokoh-tokoh tersebut selanjutnya membentuk wacana pemberitaan kasus korupsi E-KTP secara utuh. Pemilihan latar berita tersebut menyiratkan bahwa wartawan TV One berusaha meyakinkan pemirsa mengenai aliran dana E-KTP yang memang ada.

Latar atau petunjuk pengaluran pada penggalan teks berita (6) menjelaskan adanya pembacaan surat dakwaan. Sedemikian pentingnya momen tersebut, kalimat tersebut terletak di latar sebagai penjas dari isi pemberitaan dan menjadi perhatian utama dalam wacana berita korupsi E-KTP tersebut.

Pada penggalan pemberitaan kasus penjualan asset BUMD Jatim yang menyeret Dahlan Iskan seperti pada data (7), wartawan Metro TV menjelaskan secara detail mengenai riwayat kasus yang pernah menjerat Dahlan dengan lengkap. Wartawan Metro TV menggunakan strategi seperti itu untuk merekonstruksi realitas yang ada. Tujuannya untuk menggiring persepsi masyarakat mengenai siapa yang salah. Hal itu terlihat dari penjelasan presenter dengan yang menguraikan kembali kasus-kasus yang pernah dialami Dahlan Iskan.

Strategi pengemasan detail berita di NET berbeda dengan Metro TV. Wartawan NET cukup memberikan informasi mengenai kasus dugaan pelepasan asset BUMD Jatim dengan tidak menguraikan kembali sejarah kelam Dahlan melalui kasus-kasus yang pernah menyimpannya. Hal ini dikarenakan wartawan NET seolah belum yakin bahwa Dahlan Iskan memang dalang pelepasan 33 aset BUMD Jawa Timur. Maka dari itu, wartawan terlihat lebih berhati-hati dalam menginformasikan dan memberitakan kasus Dahlan Iskan tersebut.

Pada penggalan data (9) terlihat bahwa wartawan Global TV memberikan informasi secara terperinci mengenai sikap Presiden. Informasi ini bahkan disisipkan pada inti pemberitaan mengenai pungutan liar yang terjadi di Kemenhub yang menunjukkan bahwa Presiden tak main-main dalam memberantas praktik pungli dan korupsi. Di akhir konstruksi pemberitaan, wartawan memanfaatkan pola kalimat interogatif yang tidak memerlukan jawaban. Pola tersebut bertujuan untuk menggiring opini masyarakat dan ikut berpikir seperti yang wartawan harapkan.

Pada penggalan pemberitaan mengenai pelepasan aset BUMD Jatim seperti pada data (18) tersebut, wartawan Trans TV menjelaskan secara detail informasi mengenai kronologi pemeriksaan yang dijalani oleh Dahlan Iskan terkait kasus pelepasan 33 aset PT PWU. Wartawan dengan terperinci menguraikan informasi mulai dari sejarah, kronologi penyidikan sampai penetapan tersangka kasus tersebut. Penjabaran secara detail seperti ini akan memudahkan masyarakat dalam memahami informasi berita yang disaksikannya.

Pada penggalan berita korupsi dari TV One tersebut, wartawan menguraikan secara detail mengenai siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi E-KTP. Nama-nama tokoh yang disebut wartawan dalam pemberitaan tersebut membantu wartawan membangun suatu wacana berita yang utuh mengenai pemeriksaan tersangka korupsi E-KTP, yakni Sugiharto. Penyebutan nama-nama saksi tersebut memudahkan masyarakat dalam menilai dan memahami inti berita yang ditayangkan.

Pada penggalan data (12) tersebut terlihat bahwa wartawan Kompas TV mengonstruksikan beritanya secara khusus dan perinci. Aliran dana yang diterima para tersangka dan terduga diuraikan secara rinci oleh wartawan Kompas TV. Hal ini bertujuan agar semua rakyat Indonesia dapat mengetahui perincian dan kebusukan terdakwa dan tersangka tanpa tedeng aling-alang lagi. Transparansi

yang dilakukan Kompas TV digunakan untuk menarik kepercayaan masyarakat akan kecermatan informasi dari stasiun televisinya. Selain itu, agar masyarakat dapat memahami informasi secara jelas dan detail.

Dalam penggalan data (13), wartawan menggambarkan secara jelas bahwa keterlibatan Dahlan Iskan dalam kasus penjualan aset BUMD Jatim bukanlah hal yang aneh, atau dalam kata lain “wajar”. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa kasus tersebut terjadi ketika Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama PT PWU. Pertanyaan tersebutlah yang nantinya akan memengaruhi penilaian masyarakat tentang “benarkah Dahlan Iskan terlibat?”.

Pada topik mengenai kasus penjualan aset BUMD Jatim yang menjerat Dahlan Iskan, wartawan NET mengonstruksi berita mengenai penetapan tersangka Dahlan Iskan dengan cara yang berbeda, seperti pada data (14). Setelah menguraikan kronologi penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka, wartawan menyajikan prestasi-prestasi Dahlan Iskan beserta kasus yang pernah dihadapi secara lugas. Di akhir berita, wartawan menjelaskan bahwa Dahlan Iskan dikenal sebagai pejabat yang jarang mengambil gaji dan menggunakan fasilitasnya. Hal ini bisa diamati bagaimana wartawan NET tidak ingin serta merta menyalahkan dan seolah ragu jika Dahlanlah yang menjadi dalang penjualan aset BUMD Jatim tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang dapat menguntungkan diuraikan secara jelas, eksplisit, dan terbuka.

Dari penggalan teks berita (15), terlihat jelas bahwa Dahlan Iskan seolah tidak heran dengan penetapan dirinya sebagai tersangka. Hal ini dituturkan Dahlan bahwa dia merasa selama ini sudah ada pihak ‘penguasa’ yang mengincar untuk menjatuhkan dia. Wartawan menyisipkan cuplikan video mengenai pernyataan Dahlan tersebut pada tubuh beritanya sebagai penguat kalimat sebelumnya dan pembangun kalimat setelahnya. Pernyataan

ini seolah memiliki maksud untuk menggiring opini masyarakat bahwa Dahlan Iskan di sini bukanlah tersangka, melainkan korban yang dijejek oleh lawan atau pihak oposisinya.

Pada data (16), wartawan Global TV memberikan informasi mengenai keterlibatan Dahlan Iskan dalam pelepasan aset PT PWU. Jika Trans TV memfokuskan ketidakterlibatan Dahlan karena ada pihak yang ingin menjatuhkannya. Global TV menunjukkan bahwa Dahlan seolah lalai karena menandatangani dokumen yang disiapkan anak buahnya. Dari penggalan berita di atas terlihat bahwa wartawan ingin menunjukkan bahwa Dahlan dan anak buahnya memang murni bersalah karena kelalaiannya sendiri dan tidak mengaitkan penetapan tersangkanya dengan pihak lain di luar perusahaannya.

Pada penggalan teks berita (17), setelah menguraikan siapa saja yang terlibat dalam kasus megakorupsi E-KTP, wartawan TV One menyisipkan bantahan dari Jamal atas keterlibatannya dalam menerima uang suap proyek E-KTP. Dari kalimat tersebut, wartawan seolah ingin menunjukkan penyangkalan mengenai adanya kasus korupsi proyek E-KTP. Namun, di akhir berita, wartawan langsung memunculkan penjelasan dari KPK mengenai penyitaan uang kas yang diduga dari uang proyek E-KTP yang diselewengkan untuk membantah sangkalan dari Jamal.

Pada data (18) tersebut, wartawan memperlihatkan maksud dari konstruksi beritanya dengan memilih penggunaan mata uang dolar dalam wacana berita tersebut. Dengan memfokuskan penggunaan mata uang dolar, masyarakat luas akan menilai bahwa uang Negara yang telah di korupsi bernilai sangat banyak. Selain penggunaan mata uang dolar dalam perincian uang yang diterima terdakwa, wartawan juga menggunakan perincian dengan mata uang rupiah untuk menghindari ketidakpahaman masyarakat. Hal ini dimanfaatkan pihak Kompas TV selain untuk memojokkan para tersangka dan terdakwa ko-

rupsi, juga untuk memahami masyarakat mengenai berita yang disampaikannya.

Pernyataan Basaria Panjaitan pada data (19) tersebut menunjukkan premis dasar yang merepresentasikan adanya larangan melakukan praktik korupsi di bidang pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan dukungan dari pihak media Metro TV atas ketidaksetujuannya atas praktik korupsi di dunia pendidikan. Argumen yang diberikan media tersebut karena wartawan mempercayai bahwa pendidikan merupakan cikal bakal kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Sama halnya dengan data (19), wartawan NET juga memiliki praanggapan tersendiri mengenai kasus korupsi yang terjadi di ranah pendidikan di Kabupaten Kebumen tersebut. Dari data (20), wartawan meyakini bahwa praktik suap yang masuk sampai ke ranah pendidikan di Kebumen tersebut merupakan hal yang sangat merugikan masyarakat dan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal tersebut dijadikan dasar untuk memperkuat pernyataan dalam pemberitaan mengenai kasus suap yang dipercayai dapat merugikan masyarakat Kebumen.

Pernyataan Mendagri pada data (21) menunjukkan suatu asumsi dasar yang menggambarkan dukungan wartawan dalam memberantas praktik pungutan liar di sektor pelayanan publik. Dukungan wartawan tersebut dimunculkan dengan menyajikan pernyataan dari tokoh yang berkaitan dan terpercaya dalam menindak tegas pemberantasan praktik pungli di Kementerian Dalam Negeri.

Senada dengan penggalan data (21), wartawan Global TV juga memiliki praanggapan tersendiri menyangkut kasus pungutan liar yang terjadi di sektor pelayanan publik. Dari data (22), wartawan beranggapan bahwa dalam mengatasi kasus korupsi atau pungutan liar, Presiden Joko Widodo masih bersikap berat sebelah, artinya masih tebang pilih berdasarkan siapa yang melakukan korupsi tersebut. Wartawan memanfaatkan kasus Sumber Waras yang melibatkan Basuki Tjahaja

Purnama atau yang dikenal Ahok untuk memperlihatkan sikap Presiden yang terkesan melindungi mantan rekan kerjanya itu. Asumsi mengenai sikap Presiden Jokowi tersebut dikuatkan dengan pendapat pengamat hukum dan pakar hukum tata negara yang dijadikan dasar utama dalam mengonstruksi pemberitaan mengenai kasus korupsi tersebut.

Pada penggalan berita (22), pihak media TV One memunculkan praanggapan tersirat mengenai tugas Andi dalam pengerjaan proyek E-KTP yang dijadikan dasar untuk mendukung wacana pemberitaan berjudul "Korupsi E-KTP". Dasar pernyataan ini sebagai bentuk penegas atau penguat kalimat-kalimat pembangun lainnya agar masyarakat Indonesia percaya bahwa Andi Narogong juga ikut andil dalam kasus korupsi proyek E-KTP tersebut.

Pada kasus yang sama, mengenai keterlibatan Andi Narogong, media Kompas TV secara eksplisit memunculkan praanggapan berupa dugaan kuat bahwa Andi Narogong merupakan dalang dalam kasus megakorupsi E-KTP. Tanpa basa-basi, wartawan *Kompas* TV langsung memberikan pernyataan mengenai dugaan tersebut sebagai dasar terkonstruksinya suatu wacana berita. Hal ini diperkuat lagi dengan pemilihan judul berita yang mengungkapkan bahwa Andi berperan aktif dalam proyek E-KTP yang disampaikan langsung oleh KPK.

Kajian ini tidak jauh berbeda dengan kajian Rufaidah dan Sayekti (2018: 168) yang membahas struktur wacana ritual Nyadran Agung. Dalam kajian tersebut, Rufaidah dan Oktavian menyatakan struktur wacana mencakup struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Struktur makro dalam ritual Nyadran Agung adalah sosial-budaya, religius, toleransi, dan gotong royong. Superstruktur ritual Nyadran Agung meliputi prapendahuluan, pendahuluan, isi, dan penutup.

Kajian yang juga membahas berita korupsi di media dilakukan Mustika dan Mardikan-

toro (2018: 183). Mustika dan Mardikan-toro yang menganalisis secara tekstual berita korupsi di televisi menyimpulkan bahwa analisis tekstual dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap analisis kosakata, analisis tata bahasa, dan analisis struktur teks. Dalam memaparkan teks berita korupsi di Global TV, wartawan cenderung dominan menggunakan kosakata informal, disfemisme, metafora, dan pola kalimat aktif. Adapun representasi korupsi dalam berita di Trans TV lebih dominan menggunakan kosakata formal, eufemisme, kalimat pasif, dan kalimat imperatif, kalimat positif dan negatif, deklaratif, serta modalitas yang disengaja dan epistemik. Trans TV dan Global TV cenderung menjelaskan struktur teks terdiri atas lima unsur, yakni *headline* tanggal berita, berita utama, tubuh berita, dan akhir berita.

4. Simpulan

Elemen latar yang ada di dalam pemberitaan kasus korupsi juga digunakan sebagai latar belakang untuk mendukung dan memperkuat apa yang sudah diberitakan oleh pihak media. Elemen detail pada berita bertujuan untuk menguraikan bagian yang sangat terperinci mengenai suatu peristiwa. Pada kasus korupsi, wacana berita korupsi menunjukkan detail mengenai sejarah, kronologi, dan penelusuran mengenai kasus korupsi yang telah terjadi. Elemen maksud adalah makna dari suatu perbuatan, perkataan, dan sebagainya. Elemen maksud juga melihat informasi yang menguntungkan bagi penulis atau media dengan menguraikannya secara eksplisit dan jelas. Praanggapan merupakan kebalikan maksud yaitu sebuah pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks. Praanggapan adalah upaya mendukung sebuah pendapat atau opini dengan cara memberikan premis yang dipercaya kebenarannya, berupa data yang nyata dan kongkret. Adapun elemen nominalisasi berhubungan erat dengan pertanyaan apakah wartawan memandang objek sebagai suatu kelompok. Nominalisasi

merupakan strategi yang sering digunakan untuk menghilangkan kelompok sosial tertentu.

Daftar Pustaka

- Asher, R.E dan J.M.Y Simpson (Eds). 1994. *The Encyclopedia of Language and Linguistics, Volume 2*. Oxford: Pergamon Press.
- Brown, Gillian dan George Yule. 1996. *Analisis Wacana*. Jakarta: Gramedia.
- Darma, Yoce Aliah. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung : Yrama Widya.
- Dijk, Teun A. van. 1980. *Discourse Analysis in Society*. London: Academic Press Inc.
- _____. 1988a. *Newa as Discourse*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- _____. 1988b. *Macrostructures, an Interdisciplinary Study of Global Stuctures in Discourse, Interaction, and Cognition*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Wacana Kritis: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS Group.
- Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis, the Critical Study of Language*. New York: Longman.
- Fairclough, N. dan Ruth Wodak. 1997. "Critical Discourse Analysis: An Overview". Dalam Teun van Dijk (ed). *Discourse and Interaction*. London: Sage Publications, 67 – 97.
- <http://www.dw.com/id/indeks-korupsi-peringkat-indonesia-membaik-tapi-masih-buruk/a-18107694>. Diunduh tanggal 27 Mei 2016.
- Jorgensen, Marianne W. dan Louise J. Phillips. 2007. *Analisis Wacana, Teori dan Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Leech. Geoffrey. 1997. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Terj. M.D.D Oka. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mardikantoro, Hari Bakti. 2014. "Analisis Wacana Kritis pada Tajuk (Anti) Korupsi di Surat Kabar Berbahasa Indonesia". *Jurnal Litera*, 13(2), 215 – 225.
- Mustika, Prisma Meita dan Hari Bakti Mardikantoro. 2018. "Textual Analysis of Corruption News Text on Trans TV and Global TV Media: Critical Discourse Analysis by Norman Fairclough". *Jurnal Seloka*, 7(2), 173--184.
- Purnami, Wening Handri. 2017. "Ranah Pesan pada Papan Petunjuk di Objek Wisata Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Widyaparwa*, 46(2), 157--167.
- Renkema, J. 2004. *Introduction to Discourse Studies*. Philadelphia: John Benjamin Publishing Company.
- Rufaidah, Desy dan Octavian Muning Sayekti. 2018. "Struktur Wacana dalam Ritual Nyadran Agung di Kabupaten Kulon Progo". *Jurnal Widyaparwa*, 46(2), 168--178.
- Subagyo, Paulus Ari. 2010. "Pragmatik Kritis: Paduan Pragmatik dengan Analisis Wacana Kritis". *Jurnal Linguistik Indonesia*, 28(2), 177--187.
- Sudaryanto. 2015. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa, Pengantar Penelitian Wacana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.